

# **BAB I**

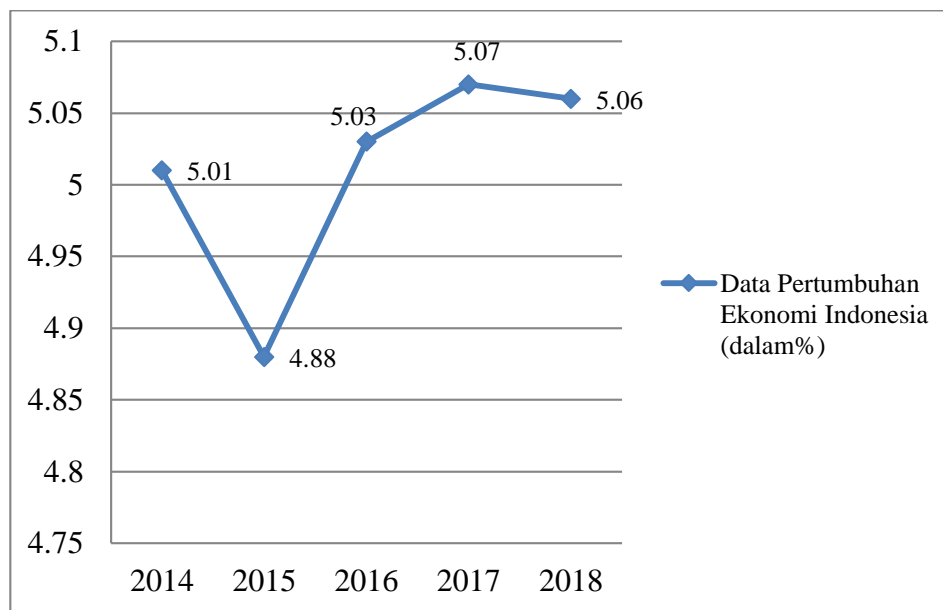
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan sosial, dan kemiskinan (Todaro, 2006). Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan mendasar dan keinginan individu atau kelompok sosial yang ada didalamnya. Sehingga adanya suatu tujuan pembangunan ekonomi ini agar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga keseimbangan ekonomi negara dan pendistribusian pendapatan yang merata.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan, merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional mencerminkan besaran aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi namun bukan satu-satunya indikator pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output suatu perekonomian. Jika output tumbuh lebih cepat daripada penduduk, output perkapita meningkat dan standar kehidupan terangkat (Case dan Fair,2007:19).

Indonesia sebagai negara berkembang yang belum mencapai kondisi *steady state* atau suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan. Terlihat pada krisis ekonomi tahun 1998 yang membuat PDB Indonesia mengalami penurunan yang cukup besar sekitar 0,56% dari tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018.

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**  
**Tahun 2014-2018**

Pada tahun 2014 Pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7% namun pada kenyataannya cenderung stagnan di posisi 5%. Pada tahun 2014 sebesar 5,01% namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,88%. kemudian secara berturut-turun pertumbuhan ekonomi mengalami stagnan

yaitu tahun 2016 sebesar 5,03%, tahun 2017 sebesar 5,07% dan pada tahun 2018 sebesar 5,06%.

Kondisi stagnasi pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia atau penyebab ekonomi melemah menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Priambodo dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budi waluyo disebabkan oleh dua hal yaitu produksi dan pengeluaran. Ketidakstabilan ekonomi Indonesia ini diantaranya diakibatkan oleh perencanaan yang kurang matang dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam proses pembangunan. Pembangunan yang kurang tepat sasaran sehingga dinilai kurang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat rendahnya penghasilan serta inflasi yang terjadi belum mampu mengendalikan harga kebutuhan, kurs mata uang yang tidak stabil sehingga besaran yang harus dibayarkan dalam transaksi perdagangan internasional lebih besar. Selain itu, dampak dari krisis global turut mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai negara adidaya krisis yang dialami Amerika Serikat berdampak buruk bagi ekonomi Indonesia mengingat negara berkembang sangat bergantung pada negara kuat.

Suatu negara harus memiliki pemerintahan yang berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi dan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peredam gejolak ini berarti mampu menstabilkan situasi menjadi lebih kondusif melalui berbagai kebijakan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki dua kebijakan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendapatan dan pengeluaran dengan tujuan menciptakan kesempatan yang tinggi tanpa inflasi (Sukirno,2006:234).

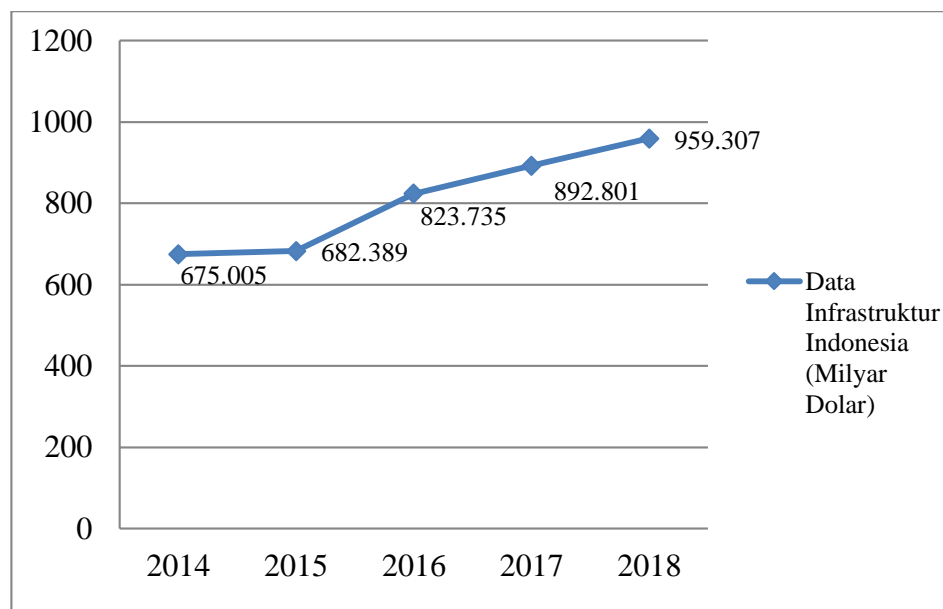
Menurut Keynes, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Menurutnya, perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw, 2013:328).

Kebijakan pengeluaran ini berperan dalam pembentukan modal melalui pengeluaran pemerintah di berbagai bidang sarana dan prasarana ini umumnya menjadi *Social Overhead Capital* (SOC) yang sangat penting karena pihak swasta tidak akan mau menyediakan fasilitas publik, sehingga pemerintah harus menyediakannya. Dengan penyediaan fasilitas publik ini maka akan menjadi daya tarik bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan akan meningkat dengan adanya berbagai fasilitas publik. Pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada perkembangannya telah mengalami banyak perubahan struktur. Pengeluaran pemerintah ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dan dinilai efektif karena dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, perlu diadakannya berbagai pengeluaran pemerintah diantaranya pengeluaran pemerintah sektor

infrastruktur sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Infrastruktur merupakan suatu sarana fisik yang dapat mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi yaitu perumahan, jalan raya dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan yang terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan dan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh bagian wilayahnya.



*Sumber: Worldbank, 2018.*

**Gambar 1.2**  
**Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur**  
**Tahun 2014-2018**

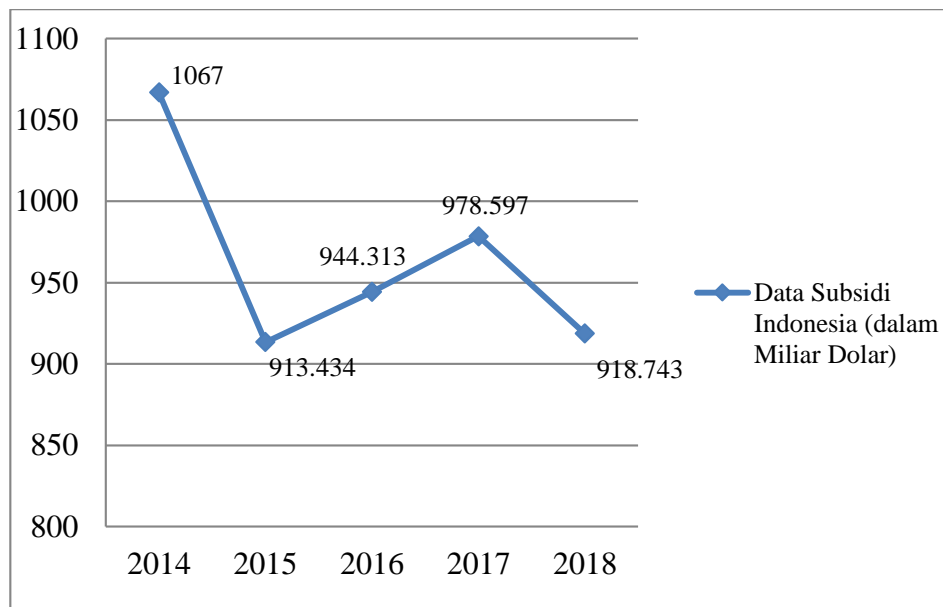
Dalam empat tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Terlihat pada gambar diatas yang semula pada tahun 2014 pengeluaran sektor infrastruktur ini sebesar US\$675.005 miliar lalu pada tahun 2015 sebesar US\$682.389 miliar meningkat 1,09% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 meningkat sebesar 20,7% menjadi US\$823.735 miliar, tahun 2017 meningkat sebesar 8,4% menjadi US\$892.801 miliar dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 7,4% menjadi US\$959.307 miliar.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Anggaran, pada tahun 2018 telah berhasil menyelesaikan pembangunan akses jalan yaitu jalan raya sepanjang 2.271,3 km, pembangunan jalan tol melalui LMAN sebanyak 12 proyek, dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera melalui PT Hutama Karya sepanjang 405 km, pembangunan jembatan sepanjang 52.449 m. Pembangunan bendungan sebanyak 48 unit, jaringan irigasi (pembangunan dan rehab) sebanyak 194.7 ribu ha. Pembangunan transportasi yaitu Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur kereta api sepanjang 615.05 km'sp. Penyelesaian bandara baru sebanyak 4 lokasi. Pembangunan perumahan yaitu perumahan untuk MBR sebanyak 50 ribu unit, dan rusun sebanyak 13.405 unit.

Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur. Tiga alasan utama pentingnya infrastuktur. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Ketiga,

perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah.

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Belanja subsidi ini terdiri dari subsidi energi dan non energi. Kebijakan subsidi ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran (Nota keuangan dan RAPBN 2014).



Sumber: WorldBank, 2018.

**Gambar 1.3**  
**Subsidi Indonesia**  
**Tahun 2014-2018**

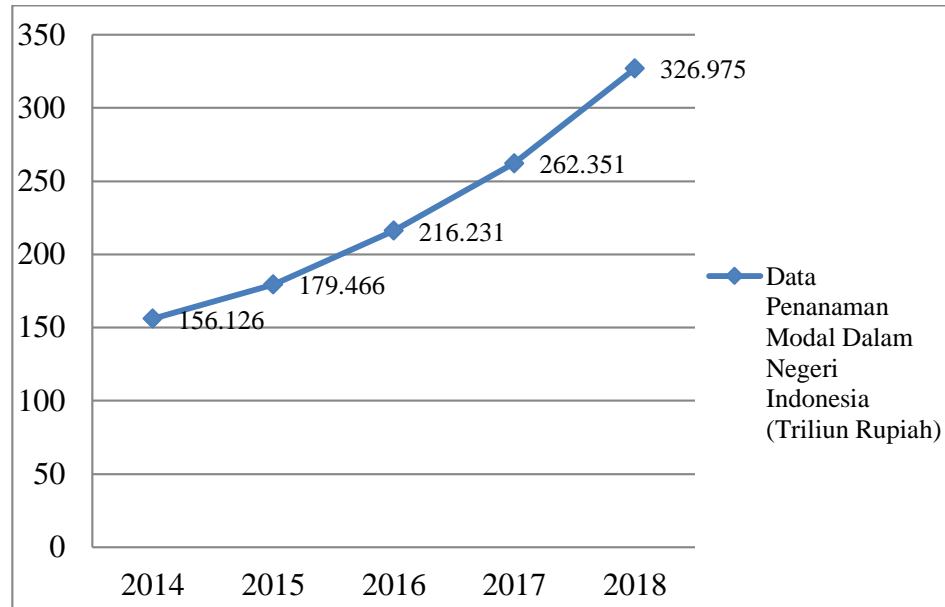
Dari gambar diatas menunjukkan perkembangan subsidi Indonesia yaitu pada tahun 2014 sebesar US\$1067 miliar. Kemudian pada tahun 2015 menurun -14,4% menjadi sebesar US\$913.434 miliar. Pada tahun 2016 meningkat 3,4% menjadi sebesar US\$944.313 miliar. Pada tahun 2017 meningkat 3,6% menjadi sebesar US\$978.597. Pada tahun 2018 kembali menurun 3,1% menjadi sebesar US\$918.743.

hal ini di akibatkan pada tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Pemangkasan belanja subsidi ini bukan karena adanya perubahan sisi kebijakan, melainkan asumsi makro. Penurunan asumsi makro tersebut menyebabkan terjadinya perubahan perhitungan pada subsidi energi.

Selain itu, investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (*output*). Besaran investasi disuatu negara menggambarkan besarnya aktivitas perekonomian, dan besarnya aktivitas perekonomian menggambarkan proses produksi yang cukup tinggi.

Investasi dalam negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri ini sebagai upaya untuk mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal dalam negeri ini memberikan efek multiplier terhadap perekonomian Indonesia.





Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2018.

**Gambar 1.4**  
**Penanaman Modal Dalam Negeri**  
**Tahun 2014-2018**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat jika penanaman modal dalam negeri terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebesar 156.126 triliun, kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 14,9% menjadi 179.466 triliun, tahun 2016 meningkat sebesar 20,5% menjadi 216.231 triliun, tahun 2017 meningkat sebesar 21,3% menjadi 262.351 triliun dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 24,6% menjadi 326.975 triliun.

Peningkatan nilai penanaman modal dalam negeri ini disebabkan oleh adanya repatriasi yang berasal dari program amnesti pajak (*tax amnesty*) tahun 2017.

Program amnesti pajak ini mendorong para investor untuk menarik dana yang dimilikinya di luar negeri untuk kemudian diinvestasikan di dalam negeri.

Berdasarkan paradigma dan fenomena yang diuraikan diatas, untuk membuktikan bagaimana pengaruh masing-masing variabel dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, peneliti tertarik untuk menganalisis dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009-2018”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi penelitian ini, identifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009-2018?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009-2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berawal dari pertanyaan yang ingin diidentifikasi oleh peneliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi, dan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009-2018.
2. Mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Infrastruktur, Subsidi dan Penanaman Modal Dalam Negeri secara bersama-sama terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2009-2018.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Mahasiswa

Untuk memperoleh pemahaman dan menambah wawasan mengenai permasalahan yang diteliti.

- b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan informasi bagi lingkungan akademika khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

c. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan kepada pemerintah, khususnya dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan pengambilan kebijakan terkait pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan perbandingan khususnya dalam hal mempelajari masalah pengeluaran pemerintah dan perumbuhan ekonomi.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini, dilaksanakan di Tasikmalaya, dengan mengakses website Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) melalui situs [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), worldbank melalui situs [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).

